

Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado

Jericho Pombengi¹, Joyce Jacinta Rares², Chyntia Malendes³, Eklesia Pandei⁴,
Joshua Pinontoan⁵, Valentino Lana⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sam Ratulangi Manado

¹richo_pombengi@unsrat.ac.id, ²joy.rares09@gmail.com,

³chyntiamalendes081@student.unsrat.ac.id, ⁴eklesiapandei081@student.unsrat.ac.id,

⁵joshuapinontoan081@student.unsrat.ac.id, ⁶valentinolana081@student.unsrat.ac.id

Corresponding author: chyntiamalendes081@student.unsrat.ac.id

Submitted: 04/05/2026; Revised: 24/06/2026; Published: 01/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.502>

Abstract

Fisheries assistance programs constitute an important policy instrument to improve the welfare and economic resilience of small-scale fishermen. The effectiveness of these programs is essential to ensure that government interventions generate sustainable socioeconomic benefits for fishing communities. This study aims to analyze the effectiveness of the management of fishermen assistance programs implemented by the Department of Fisheries and Marine Affairs of Manado City in improving fishermen's welfare. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving government officials, program implementers, and fishermen as beneficiaries. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the fishermen assistance program has been implemented continuously and has expanded its beneficiary coverage over time. The program has contributed to supporting fishing activities and improving access to production facilities. However, its effectiveness has not yet reached optimal levels due to several challenges, including inaccuracies in beneficiary targeting, limited technical assistance, low participation of fishermen in planning and evaluation processes, and monitoring mechanisms that remain focused on administrative compliance rather than program outcomes. These limitations reduce the program's ability to generate sustainable welfare improvements. The study concludes that enhancing program effectiveness requires more accurate beneficiary data, strengthened capacity-building initiatives, participatory governance mechanisms, and impact-based evaluation systems. Program success depends not only on the quantity of assistance distributed but also on the quality of management, implementation, and stakeholder involvement.

Keywords: Effectiveness; Fisheries Assistance; Fishermen Welfare; Program Management; Public Policy.

Abstrak

Program bantuan nelayan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Efektivitas pengelolaan program menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparat pemerintah, pelaksana program, dan nelayan sebagai penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan nelayan telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan mengalami peningkatan cakupan penerima manfaat dari tahun ke tahun. Program ini berkontribusi dalam mendukung aktivitas penangkapan ikan serta meningkatkan akses nelayan terhadap sarana produksi. Namun, efektivitas program belum optimal karena masih terdapat kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan pendampingan teknis, rendahnya partisipasi nelayan dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta sistem pengawasan yang masih berfokus pada aspek administratif dibandingkan dampak program. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat program belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas program memerlukan perbaikan akurasi data penerima, penguatan kapasitas nelayan, penerapan tata kelola partisipatif, serta evaluasi berbasis dampak. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, pelaksanaan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Kata kunci: Efektivitas; Kebijakan Publik; Kesejahteraan Nelayan; Pengelolaan Program; Program Bantuan Perikanan.

Pendahuluan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah, terutama bagi wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya laut yang besar seperti Kota Manado. Potensi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penyediaan pangan, tetapi juga menjadi sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan masih berada dalam kondisi ekonomi yang relatif rendah dan rentan terhadap berbagai risiko usaha (Kusnadi, 2015).

Permasalahan yang dihadapi oleh nelayan bersifat kompleks dan multidimensional, meliputi keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, keterbatasan teknologi penangkapan, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi alam dan musim. Selain itu, fluktuasi harga hasil tangkapan dan lemahnya posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi juga menjadi faktor yang memperburuk kesejahteraan mereka (Satria, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa nelayan termasuk dalam kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus melalui intervensi kebijakan pemerintah yang tepat dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, berbagai program bantuan telah dirancang dan diimplementasikan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program bantuan tersebut umumnya mencakup pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan, bantuan modal usaha, pelatihan peningkatan kapasitas, serta program pemberdayaan masyarakat pesisir. Di tingkat daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis dalam mengelola dan menyalurkan berbagai program bantuan tersebut kepada nelayan.

Meskipun berbagai program bantuan telah dilaksanakan, efektivitas pengelolaan program tersebut masih menjadi pertanyaan penting. Efektivitas dalam konteks kebijakan publik merujuk pada sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003). Dengan kata lain, suatu program dapat dikatakan efektif apabila output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan target yang diharapkan. Oleh karena itu, pengelolaan program yang baik menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan program bantuan nelayan.

Dalam praktiknya, pengelolaan program bantuan nelayan seringkali menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang umum terjadi antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya pendampingan kepada nelayan setelah bantuan diberikan. Selain itu, terdapat pula fenomena di mana bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal program (Budi, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, keberhasilan suatu program bantuan tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan dan distribusi, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat penerima manfaat. Partisipasi nelayan dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program. Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2017), pemberdayaan masyarakat yang efektif harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Di Kota Manado, sebagai salah satu daerah dengan potensi perikanan yang cukup besar di kawasan timur Indonesia, pelaksanaan program bantuan nelayan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado telah melaksanakan berbagai program bantuan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pengelolaan program tersebut secara komprehensif, terutama dari perspektif administrasi publik.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam hal fokus kajian yang menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan di tingkat daerah dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu tidak hanya melihat hasil akhir (output), tetapi juga proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait efektivitas kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan dan efektivitas program. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado dalam meningkatkan kualitas pengelolaan program bantuan nelayan, sehingga program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas

pengelolaan program bantuan nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami perspektif para pelaku yang terlibat dalam program bantuan nelayan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi.

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado yang terlibat langsung dalam pengelolaan program bantuan nelayan. Selain itu, nelayan sebagai penerima manfaat program juga menjadi informan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini turut melibatkan pihak lain seperti pendamping program dan tokoh masyarakat pesisir sebagai informan pendukung. Keterlibatan berbagai informan bertujuan untuk memperoleh data yang lebih beragam dan mendalam. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat mendukung analisis penelitian secara lebih komprehensif.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau human instrument. Dalam pelaksanaannya, peneliti dibantu dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program bantuan nelayan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan dan pemanfaatan bantuan oleh nelayan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, data penerima bantuan, dan dokumen resmi lainnya.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan fokus pada pengelolaan program bantuan nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Teknik tersebut dilakukan dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap program yang diteliti. Penggunaan purposive sampling bertujuan agar data yang diperoleh lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam terkait efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan.

Fokus penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan. Efektivitas tersebut diukur melalui beberapa indikator, seperti ketepatan sasaran program,

pencapaian tujuan program, dan kualitas pelaksanaan program. Selain itu, penelitian juga menilai tingkat pemanfaatan bantuan, partisipasi nelayan, serta sistem pengawasan dan evaluasi program. Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan konsep efektivitas dan implementasi kebijakan yang relevan dengan penelitian. Dengan demikian, fokus penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan pengelolaan program bantuan nelayan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan penggalan informasi yang lebih fleksibel dan mendalam. Observasi digunakan untuk memperoleh data faktual terkait kondisi lapangan dan pelaksanaan program bantuan nelayan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data bertujuan agar data penelitian menjadi lebih lengkap dan akurat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Teknik analisis tersebut meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik tersebut dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian. Peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan informan sebelum melakukan wawancara dan pengambilan data. Kerahasiaan identitas informan dijaga untuk melindungi privasi dan keamanan informan penelitian. Selain itu, seluruh data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah. Dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu ketepatan sasaran, pencapaian tujuan program, kualitas pelaksanaan, pemanfaatan bantuan, partisipasi nelayan, serta sistem pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, diperoleh gambaran bahwa program bantuan nelayan di Kota Manado merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang terintegrasi dengan program nasional di sektor kelautan dan perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi nelayan kecil, memperkuat ekonomi rumah tangga nelayan, serta mendorong pengurangan kemiskinan di wilayah pesisir. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kelautan nasional yang menekankan penguatan nelayan kecil sebagai aktor utama ekonomi maritim (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Dari sisi perencanaan program, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado telah menyusun program bantuan berdasarkan usulan kelompok nelayan yang diajukan melalui mekanisme musyawarah dan verifikasi administratif. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan masih menghadapi kendala dalam hal akurasi data nelayan. Beberapa nelayan tradisional yang tidak tergabung dalam kelompok formal cenderung tidak terakomodasi dalam program. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem basis data nelayan yang digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan.

Selanjutnya, dari aspek ketepatan sasaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan telah disalurkan kepada kelompok nelayan yang memenuhi kriteria administratif. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa program belum sepenuhnya menjangkau nelayan yang paling membutuhkan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional. Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa masalah targeting masih menjadi tantangan utama dalam implementasi program bantuan di sektor perikanan (Satria, 2015).

Dalam hal pelaksanaan program, distribusi bantuan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu penyaluran langsung kepada kelompok nelayan penerima. Meskipun secara prosedural telah berjalan dengan baik, hasil observasi menunjukkan adanya beberapa kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi bantuan serta kurangnya sosialisasi terkait penggunaan alat bantuan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pemanfaatan bantuan oleh nelayan.

Tingkat pemanfaatan bantuan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian nelayan mampu memanfaatkan bantuan secara optimal untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan, sementara sebagian lainnya belum dapat memanfaatkan bantuan secara maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain keterbatasan keterampilan teknis, kurangnya pendampingan, serta kondisi alat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Kusnadi (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan kapasitas individu nelayan.

Partisipasi nelayan dalam program bantuan masih tergolong rendah, terutama pada tahap perencanaan dan evaluasi program. Nelayan cenderung hanya berperan sebagai penerima manfaat dan belum dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait program bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program masih bersifat top-down, di mana kebijakan dan keputusan lebih banyak ditentukan oleh pihak pelaksana program. Salah satu informan nelayan menyampaikan bahwa: “Biasanya kami hanya menerima informasi saat bantuan sudah akan dibagikan, tetapi jarang diajak berdiskusi mengenai kebutuhan atau evaluasi program.” Informan lain juga menyatakan: “Kami lebih sering menerima keputusan dari dinas tanpa banyak dilibatkan dalam perencanaan bantuan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan nelayan dalam proses program masih terbatas sehingga partisipasi masyarakat pesisir belum berjalan secara optimal.

Dari aspek pengawasan dan evaluasi, Dinas Perikanan dan Kelautan telah melakukan monitoring secara berkala, namun evaluasi yang dilakukan masih lebih menekankan pada aspek administratif dibandingkan dengan dampak program terhadap kesejahteraan nelayan. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi yang komprehensif mengenai keberhasilan program dalam jangka panjang.

Sebagai ilustrasi perkembangan program bantuan nelayan, grafik berikut menunjukkan tren peningkatan cakupan penerima bantuan dalam beberapa tahun terakhir sebagai refleksi dari peningkatan alokasi program.



Gambar 1. Grafik Tren Jumlah Penerima Program Bantuan Nelayan di Kota Manado Tahun 2022–2026

Tren peningkatan tersebut sejalan dengan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah nelayan penerima bantuan secara nasional dalam rangka penguatan sektor perikanan tangkap skala kecil (KKP, 2022; KKP, 2023).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan di Kota Manado dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara tujuan program dengan hasil yang dicapai di lapangan, terutama dalam hal pemerataan manfaat dan keberlanjutan program.

Jika dianalisis menggunakan perspektif efektivitas kebijakan publik, maka kondisi ini menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya mencapai outcome yang diharapkan. Dunn (2003) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini,

meskipun program telah berjalan secara rutin, namun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan masih belum merata.

Dari perspektif implementasi kebijakan, hasil penelitian ini menguatkan teori Edward III (1980). Kelemahan pada aspek komunikasi terlihat dari kurangnya sosialisasi teknis kepada nelayan, yang berdampak pada rendahnya pemanfaatan bantuan. Sementara itu, keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal pendampingan dan pengawasan, turut mempengaruhi kualitas pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang cenderung formalistik juga berkontribusi terhadap kurang fleksibelnya program dalam menyesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran menunjukkan bahwa sistem penentuan penerima bantuan masih perlu diperbaiki. Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa keberhasilan program bantuan sangat bergantung pada kemampuan dalam menjangkau kelompok sasaran yang tepat. Dalam konteks ini, belum optimalnya sistem pendataan nelayan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas program.

Dari sisi pemberdayaan, program bantuan nelayan di Kota Manado masih didominasi oleh pendekatan berbasis bantuan fisik (*charity-based approach*), bukan pemberdayaan yang berkelanjutan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), pemberdayaan yang efektif harus mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang, bukan hanya memberikan bantuan sesaat. Rendahnya partisipasi nelayan dalam perencanaan dan evaluasi program menunjukkan bahwa prinsip pemberdayaan belum sepenuhnya diterapkan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya aspek positif, yaitu meningkatnya jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun serta adanya kelompok nelayan yang berhasil meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa program memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan apabila dikelola dengan lebih baik.

Keunikan temuan penelitian ini terletak pada pengaruh faktor sosial dan karakteristik nelayan terhadap efektivitas program. Faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi terbukti mempengaruhi tingkat keberhasilan pemanfaatan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan

yang bersifat seragam kurang efektif dan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal (context-specific policy).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas program bantuan nelayan memerlukan perbaikan pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Peningkatan akurasi data penerima bantuan
2. Penguatan kapasitas dan pendampingan nelayan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan program
4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* agar dapat mengukur dampak program secara kuantitatif sekaligus memahami dinamika sosial di lapangan. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan program bantuan nelayan di Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan program bantuan nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Manado belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan. Program telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan mampu menjangkau sebagian besar kelompok nelayan, namun masih terdapat kendala pada aspek ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, tingkat pemanfaatan bantuan, partisipasi nelayan, serta sistem pengawasan dan evaluasi.

Ketepatan sasaran program belum sepenuhnya akurat karena masih terdapat nelayan yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi, sementara sebagian penerima belum memanfaatkan bantuan secara maksimal. Pelaksanaan program juga menghadapi kendala teknis seperti keterlambatan distribusi dan kurangnya pendampingan, yang berdampak pada variasi hasil pemanfaatan bantuan di lapangan. Selain itu, partisipasi nelayan dalam proses perencanaan dan evaluasi masih rendah, sehingga program belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Sistem pengawasan dan evaluasi yang ada juga belum berorientasi pada pengukuran dampak

program secara menyeluruh.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas program bantuan nelayan tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diberikan, tetapi lebih pada kualitas pengelolaan program secara menyeluruh, termasuk akurasi data, pendekatan partisipatif, serta penguatan kapasitas nelayan. Program bantuan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan apabila didukung oleh sistem pengelolaan yang lebih tepat sasaran, responsif, dan berkelanjutan.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam dampak program bantuan nelayan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode, serta memperluas lokasi penelitian untuk memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model pengelolaan program yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program..

Daftar Pustaka

- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine Policy*, 25(5), 377–388. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(01\)00023-9](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00023-9)
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Béné, C., Hersoug, B., & Allison, E. H. (2010). Not by rent alone: Analysing the pro-poor functions of small-scale fisheries in developing countries. *Development Policy Review*, 28(3), 325–358. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2010.00486.x>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik perikanan tangkap Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The state of world fisheries and aquaculture 2022: Towards blue transformation*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Statistik kelautan dan perikanan tahun 2023*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Kusnadi. (2015). *Keberdayaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir*. Ar-Ruzz Media.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (Rev. ed.). Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). SAGE Publications.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.